

Revitalisasi Masyarakat Sipil dalam Mengawal Peradaban Demokrasi: Respons terhadap Populisme di Indonesia

Fadly Fahry S. Wally¹ dan Suhardi²

¹ Universitas Indonesia, E-mail: chairilmuda70@gmail.com

² Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Email: adhi.suhardi11@gmail.com

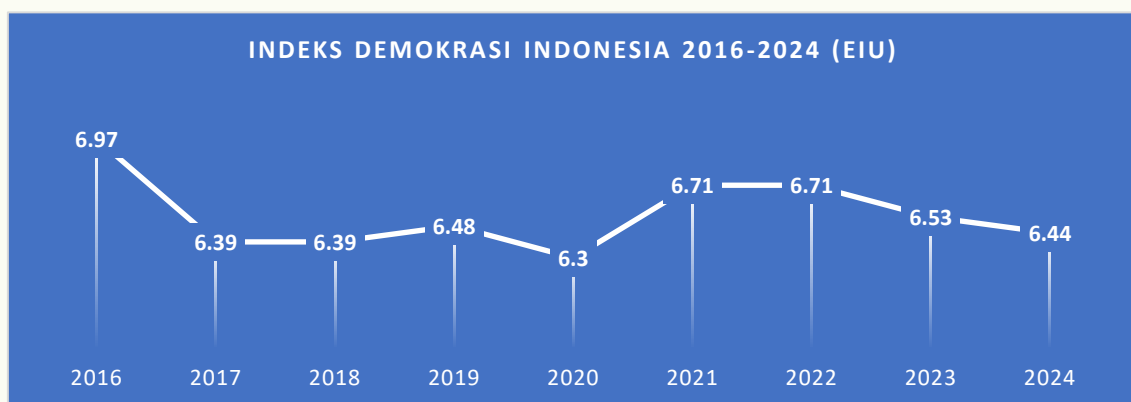
Abstract: *The wave of populism that has swept Indonesia over the past decade has posed serious challenges to democratic consolidation. This phenomenon is reflected in the 2024 elections, which are characterized by populist rhetoric, identity politics, and the weakening of checks and balances. This article analyzes the urgency of revitalizing civil society as a pillar of democracy amidst the threat of populism. Using the theoretical framework of deliberative democracy by Jürgen Habermas (1989) and the concept of counter-hegemony by Antonio Gramsci (1971), this study examines three crucial dimensions: (1) the anatomy of contemporary Indonesian populism and its impact on the space for deliberative democracy; (2) the crisis in the role of civil society in safeguarding checks and balances; and (3) strategies for revitalizing civil society through strengthening political literacy, building cross-sector coalitions, and utilizing digital space. This study finds that although Indonesian civil society faces a narrowing of its space for movement, there are strategic opportunities to strengthen deliberative capacity and build resistance to divisive populist narratives. Revitalizing civil society requires a transformation from an elitist approach to an inclusive grassroots movement, as well as strengthening strategic alliances with independent media, academia, and the progressive business sector.*

Keywords *Civil Society, Populism, Deliberative Democracy, Counter-Hegemony, Indonesia*

1. Introduction

Demokrasi Indonesia menghadapi periode kritis di tengah menguatnya gelombang populisme yang menandai lanskap politik nasional sejak pertengahan dekade 2010-an. Pemilihan Umum 2024 menjadi titik kulminasi dari transformasi politik yang ditandai oleh penggunaan retorika populis, politik identitas berbasis agama dan etnisitas, serta melemahnya prinsip-prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan (Mietzner, 2020). Indeks Demokrasi Indonesia mengalami penurunan signifikan, terutama dalam aspek fungsi pemerintahan dan proses pemilihan, menandakan adanya kemunduran dalam kualitas demokrasi.

Gambar 1: Indeks Demokrasi Indonesia (EIU)



Sumber: *The Economist Intelligence Unit (EIU)*, 2025.

Konteks Indonesia memberikan ilustrasi konkret dari kemunduran tersebut. Data Democracy Index yang dirilis oleh Economist Intelligence Unit (EIU) memperlihatkan tren stagnasi sekaligus penurunan skor demokrasi Indonesia dalam sembilan tahun terakhir. Pada 2021 dan 2022, skor Indonesia tercatat 6,71, menempatkan Indonesia dalam kategori flawed democracy (Economist Intelligence Unit, 2025). Tahun 2023, skor menurun menjadi 6,53, dan pada 2024 kembali turun ke angka 6,44, dengan posisi Indonesia merosot ke peringkat 59 dari 167 negara (Tempo English, 2025). Tren ini memperlihatkan bahwa alih-alih konsolidasi, demokrasi Indonesia justru menghadapi dekonsolidasi, dengan pelemahan paling signifikan pada aspek functioning of government dan electoral process & pluralism. Data ini semakin mempertegas bahwa Indonesia masih dianggap sebagai demokrasi cacat berkinerja buruk.

Populisme di Indonesia bukan semata-mata fenomena politik elektoral, melainkan mencerminkan krisis struktural yang lebih dalam dalam konsolidasi demokrasi. Berbeda dengan populisme klasik di Amerika Latin atau Eropa yang seringkali lahir sebagai respons terhadap ketimpangan ekonomi atau kegagalan penguatan partai politik, populisme Indonesia memiliki

karakteristik unik yang berpadu dengan politik oligarki, identitas keagamaan, dan pragmatisme elektoral (Robison, 2017). Fenomena ini menciptakan apa yang disebut sebagai "populisme pragmatis" yang tidak selalu berposisi dengan elite politik, tetapi justru dimanfaatkan oleh elite untuk melegitimasi kekuasaan mereka (Kimura, 2020).

Di tengah dinamika ini, peran masyarakat sipil sebagai pilar demokrasi mengalami tantangan serius. Organisasi-organisasi masyarakat sipil (OMS) yang seharusnya menjadi penyeimbang terhadap kekuasaan negara dan pasar menghadapi tekanan struktural berupa penyempitan ruang sipil (*civic space shrinking*), kriminalisasi aktivis, dan kooptasi oleh kekuatan politik tertentu (Y. Nugroho, 2023). Kondisi ini diperparah oleh fragmentasi internal di kalangan masyarakat sipil sendiri, yang seringkali terjebak dalam polarisasi politik yang sama dengan yang terjadi di level elite.

Namun demikian, krisis ini juga membuka peluang untuk transformasi fundamental dalam peran dan strategi masyarakat sipil. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa revitalisasi masyarakat sipil menjadi kunci dalam menahan laju otoritarianisme dan memperdalam demokrasi deliberatif (O. Törnquist, 2019). Revitalisasi ini tidak hanya berarti penguatan kapasitas organisasional, tetapi lebih fundamental lagi adalah transformasi paradigma dari elitisme menuju pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis gerakan sosial.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif urgensi dan strategi revitalisasi masyarakat sipil dalam mengawal peradaban demokrasi di Indonesia, khususnya sebagai respons terhadap ancaman populisme. Dengan menggunakan kerangka teori demokrasi deliberatif dari Jurgen Habermas (1989) yang menekankan pentingnya ruang publik (*public sphere*) untuk dialog rasional antar warga negara, serta konsep *counter-hegemony* dari Antonio Gramsci (1971) yang menekankan perlunya membangun blok historis alternatif untuk melawan dominasi kekuasaan, penelitian ini berupaya memetakan tantangan dan peluang bagi masyarakat sipil dalam konteks Indonesia kontemporer.

Teori demokrasi deliberatif Habermas menawarkan visi normatif tentang bagaimana keputusan politik seharusnya dibuat melalui diskursus publik yang bebas, setara, dan rasional, bukan melalui manipulasi emosi atau retorika populis yang menyederhanakan kompleksitas masalah publik (Habermas, 1989). Sementara itu, konsep *counter-hegemony* Gramsci memberikan kerangka strategis untuk memahami bagaimana masyarakat sipil dapat membangun narasi alternatif dan mobilisasi sosial untuk melawan hegemoni populisme yang eksklusif (Gramsci, 1971). Kedua kerangka teoretis ini saling melengkapi dalam memberikan landasan analitis dan preskriptif bagi revitalisasi masyarakat sipil.

Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: Bagaimana masyarakat sipil dapat merevitalisasi diri untuk secara efektif mengawal demokrasi di tengah ancaman populisme? Apa saja tantangan struktural dan strategis yang dihadapi? Dan strategi apa yang dapat dikembangkan untuk memperkuat kapasitas deliberatif dan counter-hegemonic masyarakat sipil? Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini penting tidak hanya secara akademis, tetapi juga praktis bagi para aktivis, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan demokratis lainnya.

2. Method

Tulisan ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2014), pendekatan ini membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif, seperti hal yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah yang bertujuan untuk membangun teori dan pola pengetahuan tertentu berdasarkan orientasi terhadap isu perubahan dan politik. Adapun jenis penelitian ini menggunakan Studi Pustaka. Menurut Mestika Zed (2014) dalam Metode Penelitian Kepustakaan, studi pustaka bertujuan untuk mengembangkan pemahaman teoritis dan konseptual terhadap suatu fenomena melalui telaah kritis terhadap sumber-sumber tertulis.

3. Result and Discussion

Anatomi Populisme Indonesia Kontemporer: Ancaman terhadap Demokrasi Deliberatif

Populisme di Indonesia kontemporer menampilkan wajah yang kompleks dan multidimensional, berbeda dari model-model populisme klasik yang umumnya dicirikan oleh dikotomi sederhana antara "rakyat murni" versus "elite korup". Populisme Indonesia lebih tepat dipahami sebagai strategi politik yang fleksibel, yang dapat diadopsi baik oleh elite maupun outsider, dan yang seringkali berpadu dengan politik identitas berbasis agama dan etnisitas (Aspinall, 2019). Pemilu 2024 menjadi bukti nyata bagaimana retorika populis digunakan secara masif oleh berbagai kandidat, mulai dari janji makan siang gratis, BBM gratis, hingga uang kuliah gratis, yang meskipun terdengar pro-rakyat, seringkali tidak disertai dengan penjelasan mekanisme pembiayaan dan implementasi yang realistis (Aspinall E. , 2019).

Karakteristik pertama dari populisme Indonesia adalah instrumentalisasi narasi anti-elite yang paradoks. Para kandidat yang datang dari kalangan elite politik dan ekonomi justru menggunakan retorika anti-kemapanan untuk memobilisasi dukungan massa. Fenomena ini menciptakan apa yang disebut sebagai "populisme oligarkis", di mana oligarki menggunakan

bahasa populisme untuk memperkuat posisi mereka, bukan untuk membongkar struktur kekuasaan yang timpang (Winters, 2011). Dalam konteks ini, populisme tidak berfungsi sebagai kekuatan emansipatoris yang memberdayakan rakyat, melainkan sebagai alat legitimasi bagi konsolidasi kekuasaan oligarkis.

Dimensi kedua adalah pemanfaatan politik identitas, khususnya identitas keagamaan, sebagai basis mobilisasi populis. Pengalaman Aksi Bela Islam 2016-2017 menunjukkan bagaimana sentimen keagamaan dapat dimobilisasi untuk kepentingan politik elektoral, menciptakan polarisasi sosial yang mendalam (Mudhoffir, 2022). Politik identitas ini tidak hanya memecah belah masyarakat, tetapi juga mengikis ruang untuk dialog dan deliberasi rasional yang menjadi fondasi demokrasi substantif. Ketika kebijakan publik diperdebatkan bukan berdasarkan argumentasi rasional tentang kebaikan bersama (*common good*), melainkan berdasarkan loyalitas primordial, maka demokrasi deliberatif mengalami kemunduran serius.

Karakteristik ketiga adalah anti-intelektualisme dan serangan terhadap lembaga-lembaga pengetahuan. Populisme Indonesia seringkali menampilkan sentimen anti-intelektual yang merendahkan peran akademisi, ahli, dan lembaga-lembaga berbasis pengetahuan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Retorika "rakyat lebih tahu" atau "ahli itu tidak mengerti realitas lapangan" menjadi senjata untuk mendiskreditkan kritik berbasis bukti empiris dan analisis ilmiah (Mietzner, 2020). Hal ini menciptakan apa yang disebut sebagai "post-truth politics", di mana fakta menjadi relatif dan kebenaran ditentukan oleh intensitas dukungan massa, bukan oleh verifikasi empiris.

Tabel 1: Skema Teoretis

Aspek	Demokrasi Deliberatif (Habermas)	Populisme (Post-truth Politics)
Basis legitimasi	Rasionalitas komunikatif	Emosi & identitas
Ruang publik	Diskursus terbuka, argumentatif	Ruang digital terfragmentasi
Hubungan warga–negara	Dialog setara	Representasi langsung "rakyat" oleh pemimpin
Dampak terhadap kebijakan	Berbasis bukti dan deliberasi	Berbasis simbol dan populisme kebijakan

Sumber: Diolah oleh penulis

Dampak populisme terhadap institusi demokrasi sangat signifikan. Prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan *checks and balances* mengalami erosi ketika pemimpin populis

menganggap dirinya sebagai perwujudan langsung dari kehendak rakyat, sehingga menolak pembatasan kekuasaan dari lembaga-lembaga pengawas seperti parlemen, peradilan, atau lembaga-lembaga independen lainnya (Crouch, 2018). Dalam logika populis, pembatasan terhadap kekuasaan eksekutif dianggap sebagai penghalang bagi kehendak rakyat, sehingga justifikasi untuk melemahkan mekanisme checks and balances menjadi kuat.

Melemahnya independensi lembaga-lembaga negara menjadi manifestasi konkret dari ancaman populisme. Kasus-kasus kontroversial terkait Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, dan lembaga-lembaga penegak hukum menunjukkan bagaimana lembaga-lembaga ini menghadapi tekanan politik yang mengancam independensi mereka (Aspinall E. W., 2019). Ketika lembaga-lembaga negara kehilangan independensi, maka sistem checks and balances tidak lagi berfungsi efektif, dan kekuasaan cenderung terkonsentrasi di tangan eksekutif atau koalisi politik dominan.

Populisme juga mengancam kebebasan pers dan ruang sipil. Media massa independen yang kritis terhadap pemerintah seringkali dituduh sebagai "anti-rakyat" atau "agen asing", sementara media yang mendukung pemerintah dipromosikan sebagai "media rakyat" (Tapsell, 2020). Organisasi masyarakat sipil yang mengkritik kebijakan pemerintah menghadapi stigmatisasi, intimidasi, bahkan kriminalisasi. Penyempitan ruang sipil ini menciptakan chilling effect yang membuat banyak aktivis dan organisasi menjadi lebih hati-hati atau bahkan menarik diri dari aktivitas advokasi kritis.

Dalam kerangka teori demokrasi deliberatif Habermas, kondisi ini merupakan ancaman fundamental terhadap eksistensi ruang publik yang otonom dan rasional. Habermas menekankan bahwa demokrasi yang sehat memerlukan ruang publik (public sphere) di mana warga negara dapat berdiskusi secara bebas dan setara tentang isu-isu publik, menghasilkan opini publik yang dapat mempengaruhi kebijakan negara (Habermas, 1989). Populisme, dengan retorikanya yang menyederhanakan masalah kompleks, mobilisasi emosi massa, dan penolakan terhadap deliberasi rasional, pada dasarnya menghancurkan ruang publik deliberatif ini.

Lebih jauh, populisme Indonesia juga berdampak pada degradasi kualitas diskursus publik. Media sosial, yang seharusnya dapat memperluas ruang publik, justru menjadi arena penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi ekstrem (Lim, 2018). Algoritma media sosial yang memprioritaskan konten emosional dan kontroversial cenderung memperkuat ruang gema dan gelembung filter, di mana individu hanya terpapar pada informasi yang mengkonfirmasi keyakinan mereka sendiri. Hal ini menciptakan fragmentasi ruang publik, di mana dialog antar kelompok yang berbeda pandangan menjadi semakin sulit.

Tantangan ini menuntut respons strategis dari masyarakat sipil. Jika demokrasi deliberatif adalah ideal normatif yang ingin dicapai, maka masyarakat sipil harus berperan sebagai fasilitator dan pelindung ruang deliberatif. Ini berarti tidak hanya melakukan advokasi kebijakan, tetapi juga membangun infrastruktur komunikatif yang memungkinkan dialog lintas perbedaan, mengedukasi publik tentang pentingnya argumentasi rasional, dan melawan narasi-narasi populis yang menyederhanakan realitas kompleks.

Krisis Peran Masyarakat Sipil: Dari Euforia Reformasi hingga Fragmentasi Kontemporer

Masyarakat sipil Indonesia mengalami transformasi dramatis sejak era Reformasi 1998. Pada awal Reformasi, organisasi-organisasi masyarakat sipil (OMS) menjadi motor penggerak demokratisasi, memainkan peran krusial dalam menggulingkan rezim otoriter Orde Baru dan mendesain arsitektur demokrasi baru (O. Törnquist, 2019). Namun, lebih dari dua dekade setelah Reformasi, masyarakat sipil Indonesia menghadapi krisis multidimensional yang mengancam efektivitas dan relevansinya dalam mengawal demokrasi. Krisis ini bersifat struktural, organisasional, maupun strategis, dan memerlukan pemahaman mendalam untuk merumuskan strategi revitalisasi yang tepat.

Krisis pertama adalah penyempitan ruang sipil (*civic space shrinking*) yang terjadi secara bertahap sejak pertengahan dekade 2010-an. Berbagai regulasi yang membatasi kebebasan berserikat dan berekspresi, seperti revisi Undang-Undang Ormas dan berbagai peraturan daerah yang restriktif, telah menciptakan lingkungan yang semakin tidak kondusif bagi aktivitas masyarakat sipil (Y. Nugroho, 2023). Kriminalisasi terhadap aktivis yang mengkritik kebijakan pemerintah, baik melalui pasal-pasal pencemaran nama baik maupun tuduhan makar, menciptakan efek jera yang signifikan. Organisasi masyarakat sipil yang bekerja pada isu-isu sensitif seperti HAM, korupsi, atau lingkungan menghadapi risiko intimidasi dan bahkan pembubaran paksa.

Dimensi kedua dari krisis ini adalah kooptasi dan fragmentasi masyarakat sipil oleh kepentingan politik dan ekonomi. Fenomena "NGO-isasi" atau pembentukan organisasi masyarakat sipil yang didanai dan dikendalikan oleh aktor-aktor politik atau korporasi untuk tujuan tertentu telah mengikis kredibilitas dan independensi masyarakat sipil secara keseluruhan (Slater, 2018). Masyarakat sipil menjadi terfragmentasi, tidak hanya berdasarkan isu atau sektor, tetapi juga berdasarkan afiliasi politik atau sumber pendanaan. Polarisasi politik yang terjadi di level elite juga merembes ke dalam masyarakat sipil, menciptakan ketegangan dan bahkan permusuhan antar organisasi yang seharusnya berbagi visi demokratis.

Krisis ketiga adalah elitisme dan jarak dengan basis sosial. Banyak organisasi masyarakat sipil, khususnya yang berbasis di Jakarta dan kota-kota besar, cenderung elitis dalam orientasi dan operasinya. Fokus pada advokasi kebijakan di level nasional, penggunaan bahasa dan konsep yang teknis, serta ketergantungan pada donor internasional, seringkali membuat OMS terputus dari komunitas akar rumput yang seharusnya menjadi basis sosial mereka (Power, 2018). Akibatnya, masyarakat sipil gagal membangun konstituen yang luas dan kuat, sehingga rentan terhadap serangan narasi populis yang menggambarkan mereka sebagai "agen asing" atau "kelompok elite yang tidak paham realitas rakyat".

Transformasi ekonomi politik Indonesia juga menciptakan tantangan baru. Menguatnya oligarki dan kapitalisme kroni telah mengubah lanskap politik Indonesia, di mana kekuasaan tidak lagi semata-mata terletak pada negara, tetapi pada jejaring kompleks antara politisi, pengusaha, dan birokrat (Pepinsky, 2022). Masyarakat sipil yang terbiasa berhadapan dengan negara sebagai lawan utama, kini harus menghadapi struktur kekuasaan yang lebih kompleks dan tersembunyi. Strategi advokasi konvensional yang berfokus pada perubahan kebijakan formal seringkali tidak efektif menghadapi kekuatan oligarki yang beroperasi di belakang layar.

Krisis kapasitas juga menjadi hambatan serius. Banyak organisasi masyarakat sipil menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi. Ketergantungan pada donor internasional menciptakan kerentanan ketika terjadi perubahan prioritas donor atau penurunan pendanaan (Y. Nugroho, 2023). Kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital dan media sosial untuk mobilisasi dan advokasi juga masih terbatas, sementara aktor-aktor politik dan kelompok-kelompok populis sudah sangat mahir menggunakan platform digital untuk menyebarkan narasi mereka.

Fragmentasi ideologis dan strategis di internal masyarakat sipil juga menjadi tantangan. Perdebatan tentang pendekatan yang tepat – apakah fokus pada advokasi kebijakan, pemberdayaan komunitas, litigasi strategis, atau mobilisasi massa – seringkali menciptakan perpecahan dan persaingan tidak sehat antar organisasi (O. Törnquist, 2019). Ketidadaan platform koordinasi yang efektif membuat respons masyarakat sipil terhadap ancaman demokrasi menjadi parsial dan tidak terkoordinasi. Ketika menghadapi kekuatan politik yang terkonsolidasi dan terorganisir dengan baik, fragmentasi ini menjadi kelemahan fatal.

Dalam kerangka konsep counter-hegemony Gramsci, kondisi masyarakat sipil Indonesia menunjukkan ketidakmampuan untuk membangun blok historis alternatif yang dapat menantang hegemoni populisme oligarkis. Gramsci menekankan bahwa perubahan sosial yang fundamental memerlukan tidak hanya perlawanan terhadap negara (war of maneuver), tetapi

juga perebutan hegemoni kultural dan ideologis di masyarakat sipil (war of position) (Gramsci, 1971). Masyarakat sipil Indonesia belum berhasil membangun narasi alternatif yang dapat menandingi daya tarik populisme, dan belum mampu memobilisasi basis sosial yang cukup luas untuk menciptakan counter-hegemony yang efektif.

Namun, krisis ini juga harus dipahami dalam konteks perubahan lanskap politik global. Fenomena penyempitan ruang sipil bukan unik bagi Indonesia, tetapi merupakan tren global yang terjadi di banyak negara, termasuk demokrasi-demokrasi mapan. Ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi masyarakat sipil Indonesia adalah bagian dari transformasi fundamental dalam politik global, yang memerlukan inovasi strategi dan pendekatan baru.

Penting juga untuk menyadari bahwa di tengah krisis, masyarakat sipil Indonesia masih menunjukkan vitalitas dan kapasitas resiliensi. Berbagai gerakan sosial baru telah muncul, khususnya di kalangan generasi muda, yang menggunakan pendekatan dan strategi yang berbeda dari generasi aktivis sebelumnya (Siregar, 2019). Gerakan-gerakan ini seringkali lebih cair, berbasis jejaring, dan memanfaatkan teknologi digital secara kreatif. Kemampuan untuk belajar dari krisis dan beradaptasi dengan konteks yang berubah menjadi kunci bagi revitalisasi masyarakat sipil.

Strategi Revitalisasi Masyarakat Sipil: Membangun Counter-Hegemony Demokratis

Revitalisasi masyarakat sipil dalam konteks Indonesia kontemporer memerlukan transformasi fundamental dalam paradigma, strategi, dan praktik. Revitalisasi ini bukan semata-mata penguatan kapasitas organisasional dalam arti konvensional, melainkan rekonstruksi peran dan identitas masyarakat sipil sebagai kekuatan demokratis yang mampu mengawal peradaban demokrasi di tengah ancaman populisme. Strategi revitalisasi harus bersifat multidimensional, mencakup penguatan kapasitas deliberatif, pembangunan counter-hegemony kultural, dan transformasi organisasional menuju model yang lebih inklusif dan berbasis gerakan sosial.

Tabel 2: Integrasi Habermas dan Gramsci

Habermas	Gramsci	Segmen
Rasionalitas komunikatif	Hegemoni budaya	Ruang publik sebagai arena perebutan ide dan nilai
Demokrasi deliberative	Counter-hegemony	Revitalisasi masyarakat sipil melalui wacana dan praksis sosial

Sumber: Diolah oleh penulis

Dimensi pertama dari strategi revitalisasi adalah penguatan literasi politik dan kapasitas deliberatif publik. Dalam kerangka demokrasi deliberatif Habermas, kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh kemampuan warga negara untuk terlibat dalam diskursus rasional tentang isu-isu publik (Habermas, 1989). Masyarakat sipil harus berperan sebagai pendidik dan fasilitator dialog publik, bukan hanya sebagai aktor advokasi yang berhadapan dengan negara. Ini berarti mengembangkan program-program pendidikan politik yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun keterampilan berpikir kritis, kemampuan berargumentasi secara rasional, dan apresiasi terhadap pluralisme dan perbedaan.

Strategi penguatan literasi politik ini harus menjangkau berbagai segmen masyarakat, khususnya generasi muda, kelompok marginal, dan komunitas-komunitas yang rentan terhadap mobilisasi populis. Penggunaan pendekatan pedagogi kritis yang partisipatif dan kontekstual menjadi penting untuk memastikan bahwa pendidikan politik tidak menjadi indoktrinasi, melainkan proses pemberdayaan yang memungkinkan individu dan komunitas untuk mengembangkan agensi politik mereka sendiri (Budiardjo, 2018). Platform-platform digital dan media sosial dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk menyebarkan konten edukatif yang menarik dan mudah diakses, tanpa mengorbankan kedalaman dan kompleksitas.

Dimensi kedua adalah pembangunan koalisi lintas sektor yang luas dan inklusif. Menghadapi kekuatan populisme yang terkonsolidasi, masyarakat sipil tidak dapat bekerja secara terisolasi. Pembangunan aliansi strategis dengan berbagai aktor – media independen, akademisi dan intelektual publik, sektor bisnis progresif, kelompok-kelompok keagamaan moderat, dan bahkan aktor-aktor politik yang berkomitmen pada demokrasi – menjadi krusial (O. Törnquist, 2019). Koalisi ini tidak hanya memperkuat kapasitas material dan sumber daya, tetapi juga memperluas basis sosial dan legitimasi masyarakat sipil.

Pembangunan koalisi memerlukan kemampuan untuk melampaui perbedaan ideologis dan strategis, menemukan kesamaan berdasarkan komitmen pada nilai-nilai demokratis fundamental seperti aturan hukum, HAM, dan pluralisme. Platform koalisi seperti yang pernah terbentuk dalam gerakan-gerakan sosial besar dapat dihidupkan kembali dan diperkuat, dengan struktur yang lebih fleksibel dan inklusif (Warburton, 2020). Penting untuk memastikan bahwa koalisi tidak didominasi oleh segelintir organisasi besar atau elite aktivis, tetapi memberikan ruang bagi partisipasi dan kepemimpinan dari berbagai kelompok, termasuk kelompok-kelompok marginal dan komunitas akar rumput.

Dimensi ketiga adalah pemanfaatan strategis ruang digital dan teknologi untuk mobilisasi dan advokasi. Era digital membuka peluang baru sekaligus tantangan bagi masyarakat sipil. Di satu sisi, platform digital memungkinkan mobilisasi cepat, jangkauan yang luas, dan biaya yang relatif rendah. Di sisi lain, ruang digital juga menjadi arena pertarungan narasi yang intens, di mana hoaks, ujaran kebencian, dan manipulasi informasi menyebar dengan cepat (Lim, 2018). Masyarakat sipil perlu mengembangkan kapasitas digital yang canggih, tidak hanya dalam hal penggunaan platform, tetapi juga dalam strategi komunikasi, analisis data, dan counter-narrative.

Pemanfaatan teknologi digital harus diimbangi dengan kesadaran tentang risiko dan keterbatasannya. Aktivisme digital (slacktivism) yang hanya berfokus pada likes, shares, dan trending topics tanpa mobilisasi riil dapat menciptakan ilusi perubahan tanpa dampak substantif. Masyarakat sipil harus mampu mengintegrasikan strategi luring dan daring, menggunakan momentum digital untuk membangun gerakan riil di lapangan. Kolaborasi dengan ahli teknologi, data scientist, dan komunikasi digital menjadi penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi.

Dimensi keempat adalah transformasi organisasional menuju model yang lebih demokratis dan berbasis gerakan sosial. Kritik terhadap elitisme dan birokratisasi organisasi masyarakat sipil menuntut transformasi fundamental dalam struktur dan kultur organisasi. Model organisasi yang hierarkis dan terpusat perlu ditransformasi menjadi model yang lebih horizontal, partisipatif, dan berbasis jejaring. Kepemimpinan kolektif, pengambilan keputusan partisipatif, dan akuntabilitas ke bawah (downward accountability) kepada komunitas yang dilayani harus menjadi prinsip-prinsip fundamental dalam organisasi.

Transformasi ini juga berarti pergeseran dari pendekatan berbasis proyek yang terikat pada siklus pendanaan donor, menuju pendekatan berbasis pergerakan yang berakar pada basis sosial yang luas. Diversifikasi sumber pendanaan, termasuk penggalangan dana dari masyarakat domestik, menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan pada donor asing dan meningkatkan keberlanjutan organisasi (Y. Nugroho, 2023). Lebih fundamental lagi, masyarakat sipil perlu membangun konstituen politik yang loyal, yang tidak hanya mendukung secara finansial, tetapi juga secara aktif terlibat dalam advokasi dan mobilisasi.

Dimensi kelima adalah pembangunan counter-narrative dan counter-hegemony kultural. Dalam kerangka Gramsci, perebutan hegemoni tidak hanya terjadi di level negara, tetapi juga di level masyarakat sipil melalui produksi dan diseminasi ide, nilai, dan narasi (Gramsci, 1971). Masyarakat sipil harus mampu mengembangkan narasi alternatif yang dapat menandingi daya

tarik populisme. Narasi ini harus mampu berbicara kepada aspirasi, kecemasan, dan pengalaman konkret rakyat, namun tidak jatuh pada penyederhanaan populis atau mobilisasi sentimen primordial.

Counter-narrative ini harus menekankan nilai-nilai inklusivitas, pluralisme, keadilan sosial, dan solidaritas. Ia harus mampu menjelaskan kompleksitas masalah publik tanpa menjadi elitis, menawarkan solusi konkret tanpa menjadi populis, dan mengkritik kekuasaan tanpa menjadi destruktif (Robison, 2017). Produksi konten kreatif – dari karya sastra, film, musik, hingga seni visual – yang mempromosikan nilai-nilai demokratis menjadi bagian penting dari strategi kultural ini. Kolaborasi dengan seniman, kreator konten, dan influencer yang memiliki jangkauan luas dapat memperkuat diseminasi counter-narrative.

Dimensi keenam adalah penguatan mekanisme checks and balances melalui pemantauan sipil dan akuntabilitas sosial. Masyarakat sipil harus memperkuat peran sebagai watchdog yang mengawasi kinerja dan integritas lembaga-lembaga negara. Ini mencakup monitoring legislasi, pengawasan anggaran publik, pemantauan pelayanan publik, dan advokasi anti-korupsi (Priyono, 2018). Penggunaan mekanisme kebebasan informasi publik, audit sosial, dan penganggaran partisipatif dapat memperkuat akuntabilitas vertikal dari negara kepada rakyat. Namun, strategi watchdog ini harus diimbangi dengan pendekatan yang lebih konstruktif dan kolaboratif. Dalam konteks tertentu, masyarakat sipil dapat berperan sebagai mitra pemerintah dalam produksi bersama pelayanan publik atau desain kebijakan bersama, tanpa mengorbankan independensi dan kapasitas kritis. Keseimbangan antara konfrontasi dan kolaborasi, antara kritik dan kontribusi, menjadi seni politik yang harus dikuasai oleh masyarakat sipil.

Dimensi ketujuh adalah penguatan kapasitas resiliensi dan perlindungan aktivis. Menghadapi penyempitan ruang sipil dan intimidasi terhadap aktivis, masyarakat sipil perlu membangun mekanisme perlindungan dan dukungan yang efektif. Ini mencakup bantuan legal untuk aktivis yang dikriminalisasi, dukungan psikososial untuk aktivis yang mengalami trauma, dan protokol keamanan digital untuk melindungi data dan komunikasi. Jaringan solidaritas regional dan internasional dapat memberikan dukungan moral dan material ketika aktivis domestik menghadapi tekanan berat.

Resiliensi juga berarti kemampuan untuk beradaptasi dengan konteks yang berubah, belajar dari kegagalan, dan terus berinovasi dalam strategi. Budaya organisasi yang mendorong refleksi kritis, pembelajaran kolektif, dan eksperimentasi menjadi penting untuk membangun kapasitas adaptif. Dokumentasi pengalaman, evaluasi program, dan penelitian aksi partisipatif dapat menjadi alat untuk pembelajaran organisasional yang berkelanjutan.

Akhirnya, strategi revitalisasi harus berpijak pada komitmen fundamental pada nilai-nilai demokratis dan HAM. Di tengah polarisasi politik dan godaan untuk menggunakan taktik populis untuk melawan populisme, masyarakat sipil harus tetap konsisten pada prinsip-prinsip demokratis, menghormati aturan hukum, menolak kekerasan dalam bentuk apapun, dan mempromosikan dialog dan deliberasi sebagai cara menyelesaikan perbedaan. Integritas moral dan konsistensi prinsip menjadi modal sosial yang tak ternilai bagi legitimasi dan efektivitas masyarakat sipil dalam jangka panjang..

4. Conclusion

Revitalisasi masyarakat sipil dalam mengawal peradaban demokrasi Indonesia di tengah ancaman populisme merupakan imperatif strategis yang mendesak. Analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa populisme Indonesia kontemporer bukan hanya fenomena elektoral temporer, melainkan mencerminkan krisis struktural yang lebih dalam dalam konsolidasi demokrasi. Populisme Indonesia, dengan karakteristik uniknya yang memadukan oligarki, politik identitas, dan pragmatisme elektoral, telah mengikis fondasi demokrasi deliberatif – ruang publik yang otonom, institusi checks and balances yang independen, dan diskursus rasional berbasis argumentasi.

Masyarakat sipil sendiri menghadapi krisis multidimensional: penyempitan ruang sipil, kooptasi dan fragmentasi, elitisme dan jarak dari basis sosial, keterbatasan kapasitas, dan fragmentasi ideologis-strategis. Krisis ini mengancam efektivitas masyarakat sipil sebagai pilar demokrasi. Namun, krisis juga membuka peluang untuk transformasi fundamental. Dengan menggunakan kerangka demokrasi deliberatif Habermas dan counter-hegemony Gramsci, kajian ini mengidentifikasi bahwa revitalisasi masyarakat sipil harus mencakup tujuh dimensi strategis: penguatan literasi politik dan kapasitas deliberatif, pembangunan koalisi lintas sektor, pemanfaatan strategis ruang digital, transformasi organisasional, pembangunan counter-narrative kultural, penguatan pemantauan sipil, dan pembangunan kapasitas resiliensi.

Strategi revitalisasi ini bukan sekadar resep teknis, melainkan proyek politik transformatif yang memerlukan komitmen jangka panjang, kepemimpinan visioner, dan solidaritas kolektif. Revitalisasi masyarakat sipil berarti melampaui model konvensional organisasi non-pemerintah yang elitis dan terfragmentasi, menuju gerakan sosial yang inklusif, berbasis akar rumput, dan memiliki basis sosial yang luas. Ia berarti membangun counter-hegemony yang tidak hanya menolak populisme secara negatif, tetapi menawarkan visi alternatif yang positif tentang demokrasi yang substansial, inklusif, dan berkeadilan.

Dalam konteks Indonesia yang plural dan kompleks, tidak ada satu pendekatan tunggal yang dapat menjawab semua tantangan. Revitalisasi masyarakat sipil memerlukan eksperimentasi, adaptasi lokal, dan pembelajaran berkelanjutan. Yang terpenting adalah konsistensi pada nilai-nilai demokratis fundamental – penghormatan pada HAM, komitmen pada aturan hukum, apresiasi terhadap pluralisme, dan keyakinan pada kemampuan warga negara untuk mengatur diri mereka sendiri melalui deliberasi dan partisipasi. Hanya dengan fondasi nilai yang kuat inilah masyarakat sipil dapat memainkan peran historis sebagai pengawal peradaban demokrasi Indonesia.

References

- Aspinall, E. (2019). Indonesia's election and the return of ideological competition. *New Mandala*, 22 April 2019.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Southeast Asia's troubling elections: Nondemocratic pluralism in Indonesia. *Journal of Democracy*, 30(4), 104-118.
- Budiardjo, M. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chua, C., & Pepinsky, T. (2022). Political oligarchy and corporate oligopoly in the Philippines and Indonesia. *Journal of Southeast Asian Economies*, 39(1), 78-102.
- Crouch, M. (2018). Shifting conceptions of constitutional democracy in Indonesia's Constitutional Court. *Contemporary Southeast Asia*, 40(2), 287-311.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. Edited and translated by Q. Hoare & G. N. Smith. New York: International Publishers.
- Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Cambridge: MIT Press.
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2017). Competing Populisms in Post-Authoritarian Indonesia. *International Political Science Review*, 38(4), 488-502.
- Heryanto, A. (2018). *Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia*. Jakarta: KPG.
- Honna, J. (2021). Civil-Military Relations in Indonesia After the 2019 Election. *Asian Survey*, 61(2), 305-329.
- Kimura, E. (2020). Populism and Political Parties in the Philippines and Indonesia. In *Routledge Handbook of Contemporary Indonesia* (pp. 168-181). London: Routledge.
- Lim, M. (2018). Roots, Routes and Routers: Communications and Media of Contemporary Social Movements. *Journalism & Communication Monographs*, 20(2), 92-136.

- Mietzner, M. (2020). Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How Indonesia's Democratic Decline Shaped its COVID-19 Response. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(2), 227-249.
- Mudhoffir, A. M. (2022). Islamic Populism: Commodification of Religion and Political Strengthening of the Middle Class in Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 41(2), 199-220.
- Muhtadi, B. (2019). *Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery*. Singapore: Palgrave Macmillan.
- Nugroho, Y., Putri, D. A., & Laksmi, S. (2023). Shrinking Civic Space in Indonesia: Trends, Implications, and Civil Society Responses. *Southeast Asian Studies*, 12(1), 45-72.
- Power, T. P. (2018). The Indonesian Political Economy in Transition. *Southeast Asian Affairs*, 2018(1), 145-162.
- Priyono, B. H. (2018). *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sahasrad, H., & Al Hamdi, R. (2021). Political Polarization and Democratic Recession in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 11(2), 231-256.
- Setijadi, C. (2020). Ethnic Chinese in Contemporary Indonesia: Changing Identity Politics and the Paradox of Sinification. *ISEAS Perspective*, 2020(71), 1-10.
- Siregar, A. E. (2019). Media Sosial dan Polarisasi Politik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(2), 131-146.
- Slater, D. (2018). Party Cartelization, Indonesian-Style: Presidential Power-Sharing and the Contingency of Democratic Opposition. *Journal of East Asian Studies*, 18(1), 23-46.
- Tapsell, R. (2020). The Smartphone as the "Weapon of the Weak": Assessing 'Digital Populism' from Below in Indonesia and the Philippines. *South East Asia Research*, 28(1), 18-32.
- Tempo English. (2025). *Indonesia's Democracy Index Drops Three Spots in 2024*. Jakarta: Tempo.co.
- Törnquist, O., Thariq, A., & Quimpo, N. G. (2019). *The Evolving Roles of Indonesian Civil Society in Local Governance*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Warburton, E. (2020). Deepening Polarization and Democratic Decline in Indonesia. In *Democracy in Decline? The Asia Forum* (pp. 25-41). London: Routledge.
- Warburton, E., & Aspinall, E. (2019). Explaining Indonesia's Democratic Regression: Structure, Agency and Popular Opinion. *Contemporary Southeast Asia*, 41(2), 255-285.

Winters, J. A. (2021). Oligarchy and Democracy in Indonesia. In Handbook of Southeast Asian Politics (pp. 123-145). London: Routledge.